

## ABSTRAK

Pada era sekarang ini, salah satu kejahatan tindak pidana di Indonesia yang mulai sulit diberantas dan justru semakin berkembang adalah mengenai tindak pidana narkoba. penyalahgunaan narkoba akan membahayakan eksistensi suatu bangsa, karena para pemakai atau pengguna cepat atau lambat akan merasa ketergantungan atau kecanduan narkoba tersebut. Sanksi mengenai penggunaan atau peredaran narkoba diatur didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi dengan adanya undang-undang mengenai narkoba tidak membuat masyarakat menjadi jera atau takut, dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus mengenai narkoba dari penggunaan dan juga peredarannya walaupun sanksinya dibuat sangatlah tegas. Hal inilah yang menjadi hambatan bagi BNN didalam penyitaan dan perampasan barang bukti tindak pidana narkoba. Lalu bagaimana proses yang dilakukan BNN untuk melakukan kegiatan tersebut serta apa yang menjadi kendala oleh pihak BNN sendiri untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penyusun menggunakan penelitian field research dengan pendekatan yuridis sosiologis artinya bahwa penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. menelusuri pelaksanaan penyitaan dan perampasan barang bukti tindak pidana Narkoba serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku di Indonesia baik undang-undang ataupun peraturan yang lainnya. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penelitian menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala lain dalam masyarakat.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyitaan dan perampasan barang bukti tindak pidana narkoba terdapat beberapa tahapan yaitu dilakukan dengan surat perintah penyitaan oleh ketua BNN, membuat berita acara penyitaan, meminta persetujuan dari ketua pengadilan negeri, melakukan penimbangan barang bukti, membuat berita acara penimbangan barang bukti, membungkus dan menyegel barang bukti, membuat berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti, dan meminta penetapan status barang bukti kepala kepala kejaksaan negeri. Sehingga yang peneliti temukan ialah proses yang dilakukan oleh pihak BNN dalam hal ini penyidik Badan Narkoba Nasional Kabupaten Cilacap ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik berupa Undang-Undang, maupun peraturan BNN itu sendiri.

Kata Kunci : Narkoba, penyitaan dan perampasan barang bukti, BNN

## ABSTRACT

In the today, one of the crime in Indonesian start difficult eradicated and even growing is about narcotic crime. Drugs abuse would harm the existence of a nation, because users or users sooner of later will feel reliance or addicted to the drugs. Regarding the use of sanctions or narcotics distribution arranged inside the law number 25 years 2009. But with the existence of the law on narcotics not make the community become deterrent or fear, evidence by the increasing number of cases concerning the use of narcotics from their courses and also although sanctions made is very firmly. These matters become an obstacle to the national narcotics agency in the seizure and deprivation evidence narcotic crime. So what is the one conducted the agency in doing this the and what is constrained by the national narcotic agency. To answer these problems on, so using study authors field research by approach sociological juridical means that this research could include systematic law, standard synchronization law, the history of law, and comparison law. Tracing the implementation of the seizure and deprivation of evidence narcotic crime and conformity with the applicable regulation in Indonesia good act or other regulation that. As for the nature of this research is descriptive it means research describe accurately the nature of an individual, the state of, symptoms, or to determine the where abouts the relationship between other problem in society. The result of this research indicate that implementation of the seizure and deprivation of narcotic crime evidence there are some stage that us done with a warrant seizure by head of BNN, made the news the event weighing evidence, packing and sealed evidence, made the news the event packaging and sealing evidence, and asked the determination of status evidence a chief of head attorney office. So that researchers found is the one conducted by the BNN in this case investigators national narcotics agency kabupaten for this in accordance with the provisions prevailing, in the form of both the act, and regulations bnn itself.

**Keywords:** Narcotics, the seizure and deprivation evidence, the national narcotics agency